

BAB I

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayahnya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Kebijakan-kebijakan ini mencakup berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Beberapa tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, kurangnya data yang akurat dan komprehensif, serta pengaruh kepentingan politik dan ekonomi yang sering kali menghambat objektivitas dan efektivitas kebijakan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan juga masih minim, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Analisis kebijakan pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta

memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan melakukan analisis yang mendalam, kita dapat memahami bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut.

Masalah gizi stunting (balita pendek) merupakan salah satu masalah gizi yang krusial, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Stunting merupakan bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat dari akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari masa kehamilan sampai usia 24 bulan. Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan, menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah gizi stunting memiliki risiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko mengalami penyakit degeneratif di masa mendatang.

Secara global angka stunting pada tahun 2000 yaitu 32,6%. Jika dibandingkan dengan angka stunting pada tahun 2017, terdapat sekitar 150,8 juta atau 22,2% balita yang mengalami stunting. Dari keseluruhan angka tersebut, setengah balita yang mengalami stunting yaitu 55% dengan jumlah 83,6 juta balita yang mengalami stunting berasal dari Asia. Sedangkan lebih dari sepertiganya berasal dari Afrika dengan persentase sebesar 39% (Kemenkes RI, 2018).

Secara global kebijakan dalam mengatasi masalah penurunan kejadian stunting harus difokuskan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau yang disebut dengan

Scaling Up Nutrition (SUN) sampai dengan usia 24 bulan. World Health Organization (WHO) merekomendasikan 3,9% penurunan stunting per tahun untuk memenuhi target penurunan stunting pada tahun 2025 yaitu 40%. Pada sepanjang siklus kehidupan,.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Perpres bidang Penanganan *Stunting* mencakup berbagai topik, termasuk aspek intervensi, kelembagaan, pemantauan, dan evaluasi. Terdapat pada Bab II Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, Pasal 2 dalam rangka percepatan penuruanan *Stunting*, ditetapkan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*.

Hal ini menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Pangkep dalam menangani *stunting* di Kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkep yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021, Peraturan ini menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak, termasuk dinas kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, perikanan, PUPR, pertanian, pengendalian penduduk, keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat desa, dan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kecamatan dan desa/kelurahan (TP PKK Kecamatan dan desa/kelurahan), dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting*.

Namun, dalam praktiknya, pemerintah daerah Kabupaten Pangkep menghadapi berbagai tantangan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pencegahan *stunting*. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, kurangnya data yang akurat dan komprehensif, serta pengaruh kepentingan politik dan ekonomi yang dapat menghambat efektivitas kebijakan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan juga masih minim,

menyebabkan kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Oleh karena itu, analisis kebijakan yang mendalam menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian kesehatan, prevalensi balita stunting di Sulawesi Selatan mencapai 27,2 % pada 2022. Provinsi ini menduduki peringkat ke-10 prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia. Sulawesi selatan memangkas tipis angka balita stunting sebesar 0,2 poin dari tahun sebelumnya. Pada 2021, tercatat prevalensi balita stunting di provinsi ini sebesar 27,4%.

Pada 2022, terdapat 14 kabupaten dengan prevalensi balita stunting di atas rata-rata angka provinsi. Sisanya 10 kabupaten/kota di bawah angka rata-rata prevalensi balita stunting Sulawesi Selatan. Kabupaten Jeneponto merupakan wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Sulawesi Selatan pada 2022, yakni mencapai 39,8%. Angka tersebut naik 1,9 poin dari prevalensi balita stunting daerah tersebut pada 2021 sebesar 37,9%. Berikutnya, Kabupaten Tana Toraja menempati peringkat kedua wilayah dengan prevalensi balita stunting terbesar di Sulawesi Selatan sebesar 35,4%. Diikuti Kabupaten Pangkajene sebesar 34,2%, Kabupaten Tana Toraja 34,1%.

Berikut pravelensi balita stunting di Sulawesi Selatan berdasarkan kabupaten/kota pada 2022 :

1. Kabupaten Jeneponto : 39,8%
2. Kabupaten Tana Toraja : 35,4%
3. Kabupaten Pangkajene Kepulauan : 34,2%
4. Kabupaten Gowa : 33%

5. Kabupaten Selayar : 32,1%
6. Kabupaten Takalar : 31,3%
7. Kabupaten Maros : 30,1%
8. Kabupaten Luwu Utara : 29,8%
9. Kabupaten Sinjai : 29,4%
10. Kabupaten Wajo : 28,6%
11. Kabupaten Bulukumba : 28,4%
12. Kabupaten Bone : 27,8%
13. Kabupaten Pare-Pare : 26,1%
14. Kabupaten Soppeng : 26,7%
15. Kabupaten Luwu : 26,7%
16. Kabupaten Enrekang : 26,4%
17. Kota Palopo : 23,8%
18. Kabupaten Luwu Timur : 22,6%
19. Kabupaten Bantaeng : 22,1%
20. Kabupaten Pinrang : 20,9%
21. Kota Makassar : 18,4%

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi daerah nomor urut tiga angka prevalensi balita stunting tertinggi di Sulsel setelah Jeneponto dan Tana Toraja. Angka ini paralel dengan tingkat angka penduduk miskin yang masuk dalam daftar 10 besar di Sulsel yang pernah dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Yakni, Kabupaten Jeneponto dan Pangkep.

Desa Mattiro Langi yang terdapat di Kabupaten Pangkep menaungi dua pulau,

yaitu Pulau Sarappo Lompo dan Pulau Sarappo Caddi. Sarappo Lompo memiliki infrastruktur yang lebih memadai dibandingkan Sarappo Caddi. Di Sarappo Lompo, terdapat fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, serta jaringan internet, air bersih, dan listrik yang mencukupi untuk menunjang kehidupan masyarakat. Sementara itu, di Sarappo Caddi, fasilitas yang tersedia masih sangat terbatas. Listrik masih menggunakan mesin genset pribadi, air bersih mengandalkan tadah hujan, dan jaringan internet belum terfasilitasi dengan baik.

Desa Mattiro Langi di Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, menghadapi masalah stunting yang signifikan. Keterbatasan akses pangan yang disebabkan oleh letak geografis yang terisolasi membuat distribusi pangan menjadi sulit dan mahal, sehingga pasokan pangan sering tidak stabil dan mahal. Mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu, tergantung pada hasil tangkapan yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca, musim, dan keberadaan ikan. Ketidakstabilan pendapatan ini menyulitkan mereka untuk membeli makanan bergizi secara konsisten.

Keterbatasan akses pangan dan ekonomi yang lemah berkontribusi pada tingginya angka stunting dan kurang gizi di desa ini, yang menyebabkan anak-anak tumbuh dengan tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya dan mempengaruhi perkembangan kognitif serta kesehatan jangka panjang mereka. Minimnya program edukasi gizi dan kesehatan memperburuk kondisi ini, karena masyarakat kurang memahami pentingnya pola makan seimbang dan praktik kesehatan yang baik. Selain itu, tingginya angka pernikahan usia muda yang sering disebabkan oleh faktor budaya dan sosial, menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan dan kurang dipersiapkan dengan baik, sehingga calon ibu muda sering tidak siap secara

fisik dan mental, yang meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu dan bayi serta berpotensi meningkatkan angka stunting. Jumlah penduduk di Desa Mattiro Langi berjumlah 828 kepala keluarga (KK), terdapat 18 anak yang termasuk dalam kategori stunting. Dari jumlah tersebut, 6 anak mengalami gizi kurang dan 12 anak memiliki berat badan kurang.

Tabel 1.1 Data Stunting Liukang Tupabbiring

No	PUSKESMAS	Desa/Kelurahan	BB/TB				
			Sangat Kurang	Berat Badan Kurang	Gizi Kurang	Sangat Pendek	Pendek
1.	SARAPPO	MATTIRO DECENG	2	3	5	1	4
2.	SARAPPO	MATTIRO BONE	0	2	2	0	3
3.	SARAPPO	MATTIRO LANGI	1	12	6	4	8
4.	SARAPPO	MATTIRO MATAE	0	0	1	0	1
5.	SARAPPO	MATTIRO UJUNG	2	6	5	2	6
6.	SARAPPO	MATTIRO ADAE	1	4	3	0	9
JUMLAH			6	23	22	7	31

Data tanggal : 2024-11-07 09:55:06 (Puskesmas Sarappo)

Berdasarkan data realitas dan penjelasan diatas, Mattiro Langi menjadi Desa di Lingkup Tupabbiring yang tingkat resiko stunting tinggi. Merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis mengkaji lebih jauh dengan mengangkat judul penelitian **“Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Dan Penurunan Angka Stunting Di Desa Mattiro Langi Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep”**.

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep Dalam Pencegahan Dan Penurunan Angka Stunting Di Desa Mattiro Langi Kecamatan Liukang Tupabbiring?
2. Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Kondisi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Dan Penurunan Angka Stunting Di Desa Mattiro Langi Kecamatan Liukang Tupabbiring?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana kebijakan pemerintah daerah di Desa Mattiro Langi Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi dan kebijakan Pencegahan Dan Penurunan Angka Stunting belum efektif

1.3 Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Dari segi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat bagi pengembangan pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan tentang analisis kebijakan Pencegahan Dan Penurunan Angka Stunting.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam hal kebijakan Pencegahan Dan Penurunan Angka Stunting.

c. Kegunaan Metodologis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang dipergunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Analisis Kebijakan

Analisis menjadi peran penting untuk menentukan suatu kebijakan yang diambil. Analisis digunakan untuk menjabarkan dari suatu sistem informasi yang lengkap ke dalam berbagai macam bagian dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai macam masalah yang timbul pada program tersebut. Dengan kata lain bahwa analisis merupakan proses untuk mengurai suatu kondisi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; penguraian suatu pokok dari berbagai bagiannya dan menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan.

Kemudian Kebijakan memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan kata kebijaksanaan. Dapat diartikan bahwa kebijaksanaan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh seseorang atau dari kelompok politik dalam upaya menunjuk upaya serangkaian tindakan guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Budiardjo 2009) dalam (Handoyo 2012, 5). Kebijakan memiliki hasil di masa yang akan datang. Kebijakan juga mencari cara-cara yang akan ditempuh, yang melibatkan dari proses hubungan organisasional. Kebijakan juga menyertakan peran dari para agen kebijakan (Handoyo 2012, 4). Jika kebijakan yang lama sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, maka akan ada kebijakan baru yang lebih efektif dan efisien.

Dikutip dari Dunn, (Muchlis 2014, 121) sebuah kebijakan dapat dinilai tepat jika memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Efisien yang artinya berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana usaha yang diperlukan agar tercapainya hasil yang diharapkan.
2. Efektif yang artinya berhubungan dengan pertanyaan bahwa apakah ada dampak yang diinginkan tercapai.
3. Kecukupan yang artinya berhubungan dengan pertanyaan mengenai sejauh mana hasil yang diharapkan sudah menyelesaikan persoalan.
4. Keadilan yang artinya memiliki hubungan dengan biaya dan manfaat yang akan didistribusikan secara merata diantara kelompok yang ada.

Menurut William Dunn (2000, 44) analisis kebijakan adalah suatu kegiatan intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menghasilkan, secara kritis menilai, dan menginformasikan pengetahuan mengenai yang ada pada proses kebijakan. Menurut

Budi Winarno, analisis kebijakan adalah “berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab akibat dan konsekuensi – konsekuensi kebijakan” (Winarno 2005, 27). Analisis kebijakan merupakan salah satu bentuk penelitian terapan yang digunakan untuk mendapatkan tingkat pengetahuan yang lebih baik tentang masalah isu-isu sosial yang membawakan solusi yang lebih baik. Dari definisi analisis kebijakan di atas dapat disimpulkan bahwa dari penelitian dan pemeriksaan dari sebuah komponen dari suatu kebijakan akan membuahkan solusi-solusi yang baik untuk kinerja kebijakan. Analisis kebijakan dapat menganalisis tampilan, isi, dan dampak dari kebijakan khusus.

Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin dan profesi yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Analisis kebijakan tidak hanya meminjam ilmu sosial dan perilaku tetapi juga administrasi publik, hukum, etika dan berbagai macam cabang analisis sistem dan matematika terapan. Analisis kebijakan dapat diharapkan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan (Meyer & Dunn, 2006), yakni: 1) Nilai yang pencapaiannya merupakan tolak ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi; 2) Fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai; 3) Tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai. Fungsi analisis kebijakan dikategorikan menjadi 3 kelompok besar menurut Nanang Fattah (2013, 12) yaitu:

1. Fungsi analisis kebijakan yang menitikberatkan pada proses penetapan agenda analisis kebijakan disebut fungsi alokasi.

2. Fungsi analisis kebijakan yang mempunyai fokus pada dimensi rasionalisasi untuk mendapatkan data-data secara teknis guna peninjauan selama proses pengambilan keputusan pendidikan disebut fungsi inkuiriri.
3. Fungsi komunikasi adalah metode yang efisien dalam menginformasikan dari hasil analisis kebijakan sehingga mendapatkan dampak yang efektif untuk proses pengambilan keputusan.

Analisis kebijakan dikelompokkan menjadi empat tingkatan analisis menurut Pearson dalam (Hamdi 2014, 126), yaitu:

1. Analisis Meta (Meta Anaysis)

Analisis meta adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis, yang berhubungan dengan aktivitas analisis yang berdasarkan pemahaman terhadap ide kebijakan publik diproses menggunakan metafora. Analisis tersebut meninjau metode yang dipergunakan dalam menentukan kebijakan publik.

2. Analisis Meso (Meso Analysis)

Analisis meso adalah analisis yang mendefinisikan masalah, menetapkan agenda, dan merumuskan kebijakan. Fokus analisis ini adalah pada ruang lingkup dalam bentuk masalah yang ada.

3. Analisis Keputusan (Decision Analysis)

Analisis keputusan merupakan analisis terhadap proses pembuatan keputusan dan analisis kebijakan untuk pengambilan keputusan. Analisis ini berkaitan menggunakan penggambaran bagaimana suatu keputusan atau serangkaian keputusan dibuat.

4. Analisis Pelaksanaan (Delivery Analysis)

Analisis pelaksanaan merupakan analisis yang digunakan terhadap implementasi, penilaian dari efek perubahan. Analisis ini berkenaan dengan menggunakan tujuan pelaksanaan berdasarkan proses kebijakan yang dibingkai oleh usaha memodelkan seperangkat sekuensi rasional.

Kontribusi prosedur dalam menganalisis kebijakan untuk mendapatkan hasil data terkait pengaturan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, output, outcome, dan impact. Menurut William Dunn dalam (Rokim 2019, 65) prosedur analisis kebijakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Merumuskan masalah atau kasus kebijakan.

Masalah kebijakan merupakan nilai, kepentingan, atau kesempatan yang belum terwujud, yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki dengan adanya tindakan publik. Fase-fase perumusan kasus mencakup pencarian kasus, pendefinisian kasus, spesifikasi kasus, dan identifikasi kasus.

2. Peramalan kebijakan pada masa depan.

Peramalan adalah proses menciptakan informasi terkini tentang kondisi sosial masa mendatang dengan berdasarkan informasi yang ada mengenai masalah kebijakan.

3. Rekomendasi kebijakan.

Rekomendasi memberikan informasi terkait nilai atau manfaat relatif dari hasil masa depan dalam memecahkan masalah.

4. Pemantauan hasil kebijakan.

Pemantauan memberikan informasi tentang hasil saat ini dan masa lalu dari implementasi kebijakan alternatif. Pemantauan adalah teknik analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang penyebab dan dampak kebijakan publik. Pemantauan ini memiliki empat fungsi pada analisis kebijakan: deskripsi, akuntansi, inspeksi, dan kepatuhan.

5. Evaluasi kinerja kebijakan.

Evaluasi memberikan informasi terkait nilai atau manfaat dari hasil pemecahan atau mengatasi suatu masalah.

Dalam proses penyusunan kebijakan menurut Dunn memiliki tahap- tahap sebagai berikut:

1. Fase Pengusuanan Agenda (Agenda Setting);

disini para pejabat diberikan wewenang atau tugas untuk meletakkan masalah kebijakan yang sesuai pada tempatnya didalam agenda publik.

2. Fase Formulasi Kebijakan (Policy Formulation);

disini para pihak berwenang yaitu para pejabat akan mengembangkan strategi dan solusi alternatif guna menyelesaikan masalah.

3. Adopsi Kebijakan (Policy Adoption);

dari beberapa strategi atau solusi yang sudah dikembangkan akan dipilih yang terbaik oleh mayoritas dan konsensus kelembagaan.

4. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation);

dari strategi atau solusi yang sudah dipilih akan dilakukan oleh unit-unit administrasi dengan memanfaatkan sumber daya yaitu finansial ataupun manusia.

5. Penilaian Kebijakan (Policy Assesment);

persyaratan dalam membuat kebijakan akan dilihat apakah sudah sesuai dengan persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksana kebijakan oleh badan pemeriksa dan badan akuntansi.

2.1.2 Pemerintahan Daerah

Stabilisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga.

Pemerintah atau Government dalam bahasa indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat- tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.

Lain hal nya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Disamping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah.

2.1.3 Stunting

Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi ketika janin masih dalam kandungan dan nampak saat anak berusia dua tahun. Balita stunting akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal (Kemenkes RI, 2018).

Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (growth faltering) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Stunting yang telah terjadi bila tidak diimbangi dengan catch-up growth (tumbuh kejar) akan menimbulkan permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya resiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental. Oleh karena itu stunting merupakan prediktor buruk yang akan berpengaruh pada pengembangan potensi bangsa (Unicef, 2013).

Langkah pencegahan stunting sangat perlu dilakukan. Berikut beberapa upaya pencegahan stunting menurut Kementerian Kesehatan (2017) yaitu:

1. Memenuhi Kebutuhan Gizi sejak Hamil Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa pra konsepsi sampai masa konsepsi. Lembaga kesehatan Millenium Challenge

Account Indonesia menyarankan untuk ibu yang sedang mengandung agar mengonsumsi makanan sehat dan bergizi maupun minum suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani masa kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan.

2. Beri ASI Eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan Ahli Nutrisi menyatakan ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk terus memberikan ASI Eksklusif selama enam bulan.
3. Dampingi ASI dengan MPASI sehat Jika bayi sudah menginjak usia 6 bulan keatas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau MPASI. Dalam hal ini pastikan makanan-makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi makro dan mikro yang sebelumnya berasal dari ASI untuk mencegah stunting. WHO merekomendasikan fortifikasi atau penambahan nutrisi ke dalam makanan.
4. Terus memantau tumbuh kembang anak Orang tua perlu untuk terus memantau tumbuh kembang anak, terutama dari tinggi badan dan berat badan anak. Selalu bawa sikecil ke Posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi ibu untuk mengetahui gejala awal gangguan dan penanganannya.
5. Selalu jaga kebersihan lingkungan Seperti yang kita ketahui, anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit, terutama kalau lingkungan sekitar mereka kurang sehat, faktor ini pula yang secara tak langsung meningkatkan peluang

stunting pada anak. Studi menyebutkan bahwa diare adalah faktor ketiga yang menyebabkan gangguan kesehatan tersebut. Sementara pemicu diare datang dari paparan kotran yang masuk kedalam tubuh sang anak.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dengan fokus 1000 hari pertama kehidupan (HPK), yang mengedepankan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian untuk memperbaiki kehidupan anak-anak Indonesia di masa mendatang. Gerakan ini melibatkan berbagai sektor dan pemangku kebijakan untuk bekerjasama menurunkan prevalensi stunting dengan melalui 2 cara yaitu :

1. Intervensi Gizi Spesifik Merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) dan berkontribusi pada 30% penurunan stunting. Kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan pada sektor kesehatan antara lain: Promosi ASI dan makanan pendamping ASI yang bergizi, pemberian tablet zat besi-folat atau multivitamin dan mineral untuk ibu hamil dan ibu menyusui, pemberian zat penambah gizi mikro untuk anak, pemberia obat cacing, pemberian suplemen vitamin A untuk anak balita, dan melakukan pencegahan dan pengobatan diare (Kemenkes, 2017).
2. Intervensi Gizi Sensitif Merupakan intervensi yang yang dilakukan untuk menanggulangi penyebab tidak langsung terjadinya stunting, seperti lingkungan yang buruk, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, pola asuh yang tidak memadai serta permasalahan ketahanan

pangan ditingkat rumah tangga, contoh dari intervensi gizi sensitif meliputi: Intervensi pola hidup bersih sehat (PHBS), seperti cuci tangan pakai sabun dan peningkatan akses air bersih, stimulasi psikososial bagi bayi dan anak-anak, keluarga berencana, kebun gizi dirumah/ disekolah, bantuan langsung tunai yang digabungkan dengan intervensi lain seperti pemberian zat gizi dan pendidikan terkait kesehatan dan gizi.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Dhea Jayanti Pratiwi, 2023. Strategi Pencegahan Stunting Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Strategi merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, dalam merencanakan strategi harus di pertimbangkan secara matang dan dilihat dari berbagai persepsi sehingga pada saat strategi tersebut di implementasikan akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Seperti strategi dalam pencegahan *stunting* yang ada di Kecamatan Medan Timur, strategi yang dipilih oleh Pemerintah Kecamatan Medan Timur adalah dengan membuat program yang berfokus pada perbaikan gizi dan nutrisi balita *stunting*, program itu disebut D'GINTING. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah dalam pencegahan *stunting* dan faktor penghambat pencegahan *stunting* di Kecamatan Medan Timur. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Strategi Michael A.Hitt. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini 11 orang yaitu, Camat Medan Timur, lima Lurah yang memiliki balita *stunting*, fungsionalis PLKB, ahli gizi, kader posyandu, orang tua balita *stunting* dan orang tua balita tidak *stunting*. Teknik

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Berdasarkan Hasil penelitian, penurunan prevalensi *stunting* di Kecamatan Medan Timur dari 10 menjadi delapan balita *stunting* tidak dipengaruhi oleh program D'GINTING ini melainkan bahwa anak tersebut sudah lebih dari lima tahun, secara pelaksanaan program D'GINTING kurang efektif namun tetap memberikan dampak positif pada pemenuhan asupan makanan pada anak namun program tersebut berjalan tiga bulan dan pelaksanaannya 14 hari disetiap bulannya, selain itu dalam program D'GINTING hanya berfokus pada perbaikan gizi dan nutrisi balita *stunting*, faktor penghambat pencegahan *stunting* di Kecamatan Medan Timur adalah ketidaksiapan anggaran dana, sarana dan prasarana, dan sosialisasi yang kurang maksimal.

2. Irwanda, 2021. Pencegahan Dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi Di Kecamatan Tangse (Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi Di Aceh). *Stunting* menjadi masalah gejala kesehatan anak, hal ini terjadi disaat kurangnya gizi yang seimbang sejak Seribu Hari Pertama Kelahiran (1000 HPK). Yang mengakibatkan Pertumbuhan badan yang tidak normal dengan seusianya, bukan hanya dari Pertumbuhan namun *Stunting*, bisa berdampak pada Kognitif. Kecamatan Tangse menjadi salah satu Daerah yang mengalami gejala *stunting* yang cukup tinggi dari 5 Kecamatan, hal ini terbukti dengan jenjang waktu 3 tahun (2018,2019, 2020). Dalam hal ini , Provinsi Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 tahun 2019

Tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Kecamatan Tangse, dan Bagaimana upaya Integrasi antar Pemerintah di Kecamatan Tangse dalam pencegahan dan penanganan *stunting* Terintegrasi. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Peraturan Gubernur Aceh tersebut berjalan dengan baik di beberapa Desa, hal ini terlihat dari kegiatan-kegiatan yang di laksanakan seperti, Penimbangan badan dan Pengukuran badan baduta dan balita, pemberian makanan bergizi, dan Vitamin dan obat yang dibutuhkan. Pelaksanaan kegiatan- kegiatan pencegahan dan penanganan *stunting* di Kecamatan Tangse, dengan lokus Desa Ulee Gunong, Desa Blang Dhod, dan Desa Pulo Kawa belum terlaksana dengan baik, secara umum pencegahan dan penanganan *stunting* sudah terlaksana. Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Gubernur Aceh. Berdasarkan Perencanaan dan Penganggaran yang dilaksanakan di setiap SKPD, Pada hasil data pemantauan dan evaluasi menyatakan bahwasanya kegiatan sudah berjalan dan mencapai target hanya Rumoh Gizi Gampong, serta Rumah Pangan Lestari (RPL) belum mencapai target.

3. **Andi Reski Apriani (2022).** Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dilihat dari indikator pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder. Data hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara,

observasi dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian tersebut Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar belum efektif dengan mengacu pada teori Duncan dalam Steers (1985) yang terdiri dari 3 indikator yaitu pertama Pencapaian Tujuan yang telah sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan program, namun target nasional 14% belum tercapai pada tahun 2021, kedua yakni Integrasi yang terdiri dari 2 sub-indikator yakni prosedur yang sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan program dan tingkat keberhasilan proses sosialisasi yang cukup merata ke seluruh masyarakat serta proses komunikasi dengan organisasi lain berjalan dengan baik. Indikator ketiga yakni Adaptasi yang terdiri dari peningkatan kemampuan yang dilakukan melalui upaya khusus sehingga berhasil menurunkan sedikit prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas Benteng dan sarana dan prasarana yang telah memadai namun terbatas dalam hal ruangan.

1. Tabel Matriks penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian tesis ini:

Judul penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi	Perbedaan
Dhea Jayanti Pratiwi (2023) Strategi Pencegahan Stunting Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan	Berdasarkan Hasil penelitian, penurunan prevalensi <i>stunting</i> di Kecamatan Medan Timur dari 10 menjadi delapan balita <i>stunting</i> tidak dipengaruhi oleh program D'GINTING ini melainkan bahwa anak tersebut sudah lebih dari lima tahun, secara pelaksanaan program D'GINTING kurang efektif namun	Pencegahan stunting	Lokasi Penelitian di Kota Medan

	tetap memberikan dampak positif pada pemenuhan asupan makanan pada anak namun program tersebut berjalan tiga bulan dan pelaksanaannya 14 hari disetiap bulannya, selain itu dalam program D'GINTING hanya berfokus pada perbaikan gizi dan nutrisi balita <i>stunting</i>, faktor penghambat pencegahan <i>stunting</i> di Kecamatan Medan Timur adalah ketidaksiapan anggaran dana, sarana dan prasarana, dan sosialisasi yang kurang maksimal.		
Irwanda (2021) Pencegahan Dan Penanganan <i>Stunting</i> Terintegrasi Di Kecamatan Tangse (Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan <i>Stunting</i> Terintegrasi Di Aceh)	Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Peraturan Gubernur Aceh tersebut berjalan dengan baik di beberapa Desa, hal ini terlihat dari kegiatan-kegiatan yang di laksanakan seperti, Penimbangan badan dan Pengukuran badan baduta dan balita, pemberian makanan bergizi, dan Vitamin dan obat yang dibutuhkan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan	Pencegahan Stunting	Lokasi Penelitian Di Provinsi Aceh

	dan penanganan <i>stunting</i> di Kecamatan Tangse, dengan lokus Desa Ulee Gunong, Desa Blang Dhod, dan Desa Pulo Kawa belum terlaksana dengan baik, secara umum pencegahan dan penanganan <i>stunting</i> sudah terlaksana. Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Gubernur Aceh. Berdasarkan Perencanaan dan Penganggaran yang dilaksanakan di setiap SKPD, Pada hasil data pemantauan dan evaluasi menyatakan bahwasanya kegiatan sudah berjalan dan mencapai target hanya Rumoh Gizi Gampong, serta Rumah Pangan Lestari (RPL) belum mencapai target.		
--	---	--	--

Andi Reski Apriani (2022). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar	Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar belum efektif dengan mengacu pada teori Duncan dalam Steers (1985) yang terdiri dari 3 indikator yaitu pertama Pencapaian Tujuan yang telah sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan program, namun target nasional 14% belum tercapai pada tahun 2021, kedua yakni Integrasi yang terdiri dari 2 sub-indikator yakni prosedur yang sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan program dan tingkat keberhasilan proses sosialisasi yang cukup merata ke seluruh masyarakat serta proses komunikasi dengan organisasi lain berjalan dengan baik. Indikator ketiga yakni Adaptasi yang terdiri dari peningkatan kemampuan yang dilakukan melalui upaya khusus sehingga berhasil menurunkan sedikit prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas Benteng dan sarana dan prasarana yang telah memadai namun terbatas dalam hal ruangan.	Penurunan Stunting	Lokasi Penelitian Kabupaten Selayar
---	--	---------------------------	--

Nurhalilah (2024). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Dan Penurunan Angka Stunting Di Desa Mattiro Langi Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep		Pencegahan dan Penurunan Stunting	Lokasi Penelitian Kabupaten Pangkep
--	--	---	--

2.3 Kerangka pikir

Ada beberapa Hal-hal pokok yang menjadi dasa alur pikir dari penelitian yang akan dilakukan guna mengeksplorasi permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya. Hal-hal tersebut kemudian digambarkan berdasarkan skema kerangka konseptual sebagai berikut :

BAGAN 2.1 Kerangka Konseptual



